



Evaluasi SAKIP 2026

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju**

Oleh :

**Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
Kadis KOMINFOSIP Kab. Mamuju**



Dasar Hukum

★ **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang mewajibkan instansi
pemerintah melakukan Perencanaan,
Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
Internal**

★ **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(PermenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**



KREATIF Point 5

**Digitalisasi Pemerintahan
dan Optimalisasi
Pelaksanaan e-Government**



Visi



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si
BUPATI MAMUJU



YUKI PERMANA, ST
WAKIL BUPATI MAMUJU

**MAMUJU
KEREN**
(Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)

Misi

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan Pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi



Dr. Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.SI
BUPATI MAMUJU



YUKI PERMANA, ST
WAKIL BUPATI MAMUJU

DISKOMINFOSIP MAMUJU

Misi 1 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran RPJMD :

**Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
Berbasis Elektronik**

Indikator Sasaran :

**Indeks Sistem Pemeintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)**

**Tujuan RENSTRA
DISKOMINFOSIP :**

**Optimalisasi
Pelaksanaan
e-Government dengan
Mewujudkan
Transformasi Digital
yang Aman Berbasis
Data**

Indikator Tujuan :

**Indeks Sistem Pemeintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)**

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA (LHE INSPEKTORAT)



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS PENYELESAIAN
1. 	Perjanjian Kinerja (PK) agar diformalkan dengan tandatangan pejabat berwenang (Bupati Mamuju) sehingga dapat menjadi dasar pengukuran serta pelaporan kinerja	Telah melengkapi Perjanjian Kinerja (PK) tandatangan pejabat berwenang (Bupati Mamuju)	 Selesai
2. 	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bentuk transparansi informasi kinerja kepada Masyarakat	Dokumen Perencanaan telah dipublikasikan pada Website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.	 Selesai
3. 	Melakukan penyelarasan antara indikator kinerja yang tercantum dalam Laporan Kinerja dengan indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Telah dilakukan penyelarasan indikator kinerja antara Laporan Kinerja dengan Perjanjian Kinerja (PK)	 Selesai
4. 	Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja secara lebih optimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, penentuan prioritas program dan kegiatan, serta penyempurnaan strategi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja organisasi	Pengukuran Kinerja akan dioptimalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen	 Selesai

Status/Progres Penyelesaian (Link)

https://drive.google.com/file/d/1do9emrkRoUwn_aAKRs3t9FM_LtsIvxewx/view?usp=sharing

<https://diskominfo.sip.mamujukab.go.id/category/dokumen/laporan/>

https://drive.google.com/drive/folders/1vHqemZDG5J7_fGUbUs5qqoeaaMV9vaEB?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1zNoUrHSVVG1z5IL6hluaPv4-Yk1Qg2Fs?usp=sharing>





**DISKOMINFOSIP
MAMUJU**

MATRIKS TINDAK LANJUT

HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA (LHE INSPEKTORAT)



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS PENYELESAIAN	Status/Progres Penyelesaian (Link)
5.	 Melengkapi BAB I Laporan Kinerja dengan uraian mengenai isu strategis organisasi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	 Pada BAB I telah dilengkapi dengan uraian mengenai isu strategis organisasi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada halaman 19	 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1rGTx45TgOwDxaeQtBwobvJPhuHiCCoU?usp=sharing
6.	 Melengkapi laporan kinerja dengan penjelasan atau analisis terhadap indikator kinerja yang tidak terlaksana atau tidak terealisasi	 Indikator Kinerja yang tidak terlaksana telah dilengkapi penjelasan, terdapat pada halaman 40	 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18wIPs-rW6WhyqP_c-NocoYOsn4UJ6kk?usp=sharing
7.	 Membuat laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dituangkan dalam laporan ini	 Membuat laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterima	 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1ww2gzho1CHAc67oCsaof1D7f5LT2mUOZ?usp=sharing
8.	 Capaian peningkatan kinerja harus lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dan Informasi mengenai kinerja agar dapat ditingkatkan keandalannya	 Dengan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sudah memiliki interpretasi sangat baik	 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/14mQyhzwydAbM8_8kpU9600HwwGGZEhxP?usp=sharing



Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen Yang Di Nilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,50
2. Pengukuran Kinerja	30	18,00	19,50
3. Pelaporan Kinerja	15	11,00	11,25
4. Evaluasi Kinerja	25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,00	70,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Sumber Data : LHE Inspektorat Tahun 2025



**DISKOMINFOSIP
MAMUJU**

Hasil Evaluasi SAKIP



Peningkatan Kinerja Kuantitatif & Kualitatif

70.75

PREDIKAT AKUNTABILITAS

KATEGORI "BB" (SANGAT BAIK)



Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju mengalami Peningkatan dari 69.00 (Predikat B) pada Tahun 2024 menjadi 70.75 (Predikat BB) pada Tahun 2025



**Kenaikan Nilai :
Meningkat sebesar **+1.75 point****



**Peningkatan Kualitas :
Penguatan pada Pengukuran Kinerja (+1.50)
dan Pelaporan Kinerja (+0.25)**



Pohon Kinerja

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN
TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA**

**IK : INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)**

**URUSAN PEMERINTAH
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan
Aksesibilitas Informasi Publik Bagi
Masyarakat**

**IK : Persentase Keterbukaan Informasi dan
Komunikasi Publik**

**Meningkatnya jangkauan dan kualitas
komunikasi publik pemerintah daerah**

**IK : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik
Pemerintah Daerah**

**URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK**

**Sasaran 2 : Meningkatkan Implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik
yang Efektif dan Efisien**

**IK : Persentase Layanan Publik yang
Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi**

**Meningkatnya kualitas Layanan Teknologi
Pemerintah Secara Digital (Layanan
Administrasi Pemerintahan dan Layanan
Publik Berbasis Elektronik)**

**IK : Persentase Layanan Perangkat Daerah
yang Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi**

**URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN**

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan
Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan**

IK : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

**Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral
dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan daerah**

**IK : Persentase Pemanfaatan Data Statistik
Sektoral dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pembangunan Daerah**

**URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN**

**Sasaran 4 : Meningkatkan Keamanan Informasi
dan Ketahanan Siber dalam Transformasi
Digital Pemerintah**

**IK : Persentase Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi**

**Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui
Penyelenggaraan Persandian**

**IK : Persentase Tingkat Keamanan
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**

**Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah**

**IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah**

**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan,
laporan keuangan dan pentasabilan kantor**

**IK : 1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
2. Persentase Kualitas Laporan Keuangan Daerah
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor**

Link Pohon Kinerja :

https://drive.google.com/file/d/1ihD_VvhpyrMdD5PC7mH3NA2EvegkPamy/view?usp=sharing

CASCADING DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU

LEVEL KINERJA



KINERJA STRATEGIS DAERAH



KINERJA STRATEGIS BIDANG URUSAN



KINERJA MANAJERIAL

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

INDEKS SISTEM PEMERINTAJAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA

INDEKS SISTEM PEMERINTAJAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat

Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah

Nilai AKIP (Predikat)

Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik (%)

Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)

Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)

SASARAN RENSTRA DINAS KOMINFOSIP

INDIKATOR SASARAN RENSTRA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu (%)
2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu (%)
3. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor (%)

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK

Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektorial Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)

PROGRAM

INDIKATOR OUTCOME

KINERJA JABATAN

TUJUAN RPJMD

INDOKATOR TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

INDIKATOR SASARAN RPJMD

TUJUAN RENSTRA DINAS KOMINFOSIP

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

SASARAN RENSTRA DINAS KOMINFOSIP

INDIKATOR SASARAN RENSTRA

PK KEPALA DAERAH



PK KEPALA DINAS



PK ESELON 3



CROSSCUTTING

Sinergi Lintas Sektor

**Kolaborasi Strategis Antar Bidang dan Mitra Kerja untuk Mewujudkan
Transformasi Digital Kabupaten Mamuju yang Aman & Berbasis Data**

Link Crosscutting :

https://drive.google.com/file/d/1ihD_VvhpyrMdD5PC7mH3NA2EvegkPamy/view?usp=sharing

Kolaborasi Bidang Utama



1. Bidang IKP

Meningkatnya Kualitas & Aksesibilitas Informasi Publik



Bentuk Kolaborasi : Penanganan pengaduan SP4N-LAPOR!, publikasi media, optimalisasi PPID, serta pelaksanaan Informasi Keliling.

Mitra : Balaiioka Monitoring, Dinas Kominfo Prov. Sulbar, KPID, Media Online & Cetak, Seluruh Perangkat Daerah Pemkab Mamuju, KIM, RRI, dan TVRI



2. Layanan SPBE

Implementasi SPBE untuk Pelayanan Publik Efektif



Bentuk Kolaborasi : Integrasi layanan SPBE, pengelolaan sub-domain, pengusulan jaringan internet, pengelolaan server, dan pengembangan platform digital

Mitra : Komdigi, Pusat Data Nasional (PDN), Dinas Kominfo Prov. Sulbar, Seluruh Perangkat Daerah Pemkab Mamuju, Fasilitas Kesehatan & Pendidikan Kabupaten, serta Provider Telekomunikasi



3. Data & Statistik

Pengelolaan & Pemanfaatan Data Statistik Sektoral



Bentuk Kolaborasi : Keikutsertaan dalam Penilaian EPSS, penguatan Forum Satu Data Indonesia (SDID), pengelolaan DT-SEN, serta pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di mana Diskominfosip berperan sebagai Walidata

Mitra : Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Dinas Kominfo Prov. Sulbar, dan Seluruh Perangkat Daerah Pemkab Mamuju



DISKOMINFOSIP
MAMUJU

CrossCutting

KEAMANAN & PENUNJANG AKUNTABILITAS



Keamanan Informasi & Internal



PERSANDIAN & SIBER

4. Persandian & Keamanan Informasi

Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemkab Mamuju



Bentuk Kolaborasi :

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penguatan Sistem Keamanan Informasi, pembentukan/operasionalisasi Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), serta pengelolaan aplikasi SANAPATI



Mitra : Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dinas Kominfo Prov. Sulbar, dan Seluruh Perangkat Daerah Pemkab Mamuju



AKUNTABILITAS INTERNAL

5. Penunjang Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Penatausahaan



Bentuk Kolaborasi : Penyusunan Dokumen Perencanaan terpadu, Penyelarasan Keuangan, Pengelolaan BMD dan Administrasi ASN



Mitra : Bapperida, Inspektorat, BKPP, dan BPKAD

Isu Strategis **DISKOMINFOSIP**

- ✓ **Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab**
- ✓ **Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat**
- ✓ **Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju**
- ✓ **Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju**
- ✓ **Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju**
- ✓ **Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai**
- ✓ **Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan andal**
- ✓ **Pengembangan sumber daya aparatur di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi**



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju

Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
 Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	90 %	73,10 %
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	100 %
 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,63
	Indeks IPS	1,9	Tidak Terlaksana
 Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	92,99 %
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	BB

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026 TW I
(1)	(2)	(3)	(4)
S1  Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	2,75	Masih Tahap Sosialisasi Indeks PEMDI
	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	70	33,33 %
S2  Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	60	20 %
S3  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00	Masih Dalam Tahap Evaluasi
S4  Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60	12,5 %
S5  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah	BB	Proses

Beberapa Capaian yang Telah di Dapatkan

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 CAPAI PREDIKAT



Sumber Data : Olahan Data KemenPANRB



Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi melampaui **Target 67%** dengan **Realisasi 92,99%**

Capaian Ini Menandakan Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Instansi Pemerintah Terhadap Perlindungan Data dan Keamanan Siber



Pada Tahun 2025 sudah terealisasi sebanyak **337 ASN** yang telah memiliki dan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (**TTE**)



Beberapa Capaian yang Telah di Dapatkan

Sinkronisasi Usulan Bantuan Mandiri (RTGS)

Kategori Sektor	Jumlah Instansi
 Sektor Pendidikan (PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK)	21
 Sektor Kesehatan (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)	5
 Sektor Pemerintahan (Desa dan Kelurahan)	5
 Sektor Keagamaan (Masjid dan Gereja)	4
 Fasilitas Umum (Koperasi dan BUMDesa)	4
Total Keseluruhan	39

✓ Tersedianya Data berdasarkan Nama Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan dengan Persentase **19,64 %** yang masih dalam **Kategori Blankspot**

✓ Tersedianya Data usulan bantuan internet untuk titik Blankspot pada Fasilitas Pendidikan sebanyak 21 Titik, Fasilitas Kesehatan 5 Titik, Fasilitas Pemerintahan 5 Titik, Fasilitas Keagamaan 4 Titik dan Fasilitas Umum 4 Titik. Total usulan pada **Tahun 2026** sebanyak **39 Titik**

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

73,10



KATEGORI: **BAIK**

Layanan	Nilai (%)
 Layanan Tanda Tangan Elektronik TTE	79,1
 Informasi Media Sosial	77,1
 Informasi Keliling	65,4
 Kerja Sama Media	64,7
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	64,7
 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	62,1
 SP4N-LAPOR!	61,4
 Pembuatan Sub Domain	56,9

KESIMPULAN

Berdasarkan survei terhadap 153 responden, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **73,10** dengan kategori **BAIK**.

DATA RESPONDEN

Jenis Kelamin

 Laki-Laki	74
 Perempuan	79

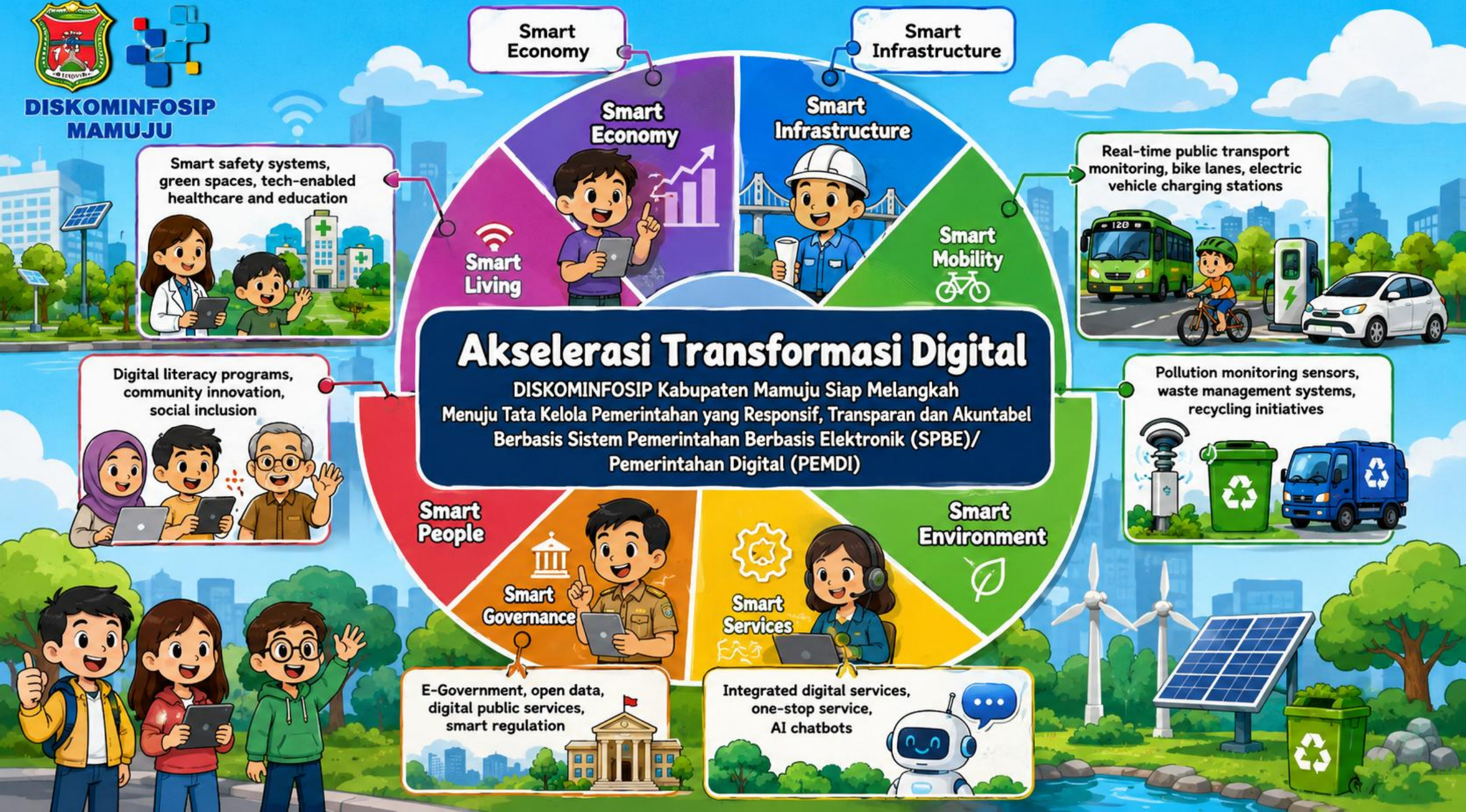
Pendidikan

 SD	2
SMP	1
SMA	37
DIII/D4	17
S1	77
S2/S3	19

Jumlah Responden: **153 Orang**



Scan QR di atas untuk gabung ke saluran WhatsApp kami



terima kasih



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju